



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SULAWESI UTARA
TAHUN 2020



*Jalan Manembo-Nembo Tendekei
Sagerat Dua ,Matuari
Kota Bitung*



badiklat-sulut.kemenkumham.go.id



Diklatkumhamsul



badiklatkumhamsulut



Balai Diklat Kumham Sulut



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini menjelaskan tentang rencana dan capaian kinerja serta penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

H. Lotje Olga
NIP. 19641020198503200

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | II |
| DAFTAR ISI..... | III |
| DAFTAR GRAFIK..... | IV |
| DAFTAR TABEL..... | V |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar belakang..... | 2 |
| B. Visi,Misi dan Tujuan..... | 3 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 13 |
| D. Struktur Organisasi..... | 16 |
| E. Sumber Daya Manusia..... | 18 |
| F. Sasaran Strategis Balai Diklat Sulut..... | 19 |
| G. Sistematika Laporan..... | 20 |
| BAB II..... | 21 |
| A.Rencana Strategis (RENSTRA)..... | 22 |
| B.Perjanjian Kinerja..... | 23 |
| BAB III..... | 24 |
| A.Capaian Kinerja..... | 25 |
| B.Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut..... | 43 |
| C.Kendala/Hambatan..... | 45 |
| D.Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan..... | 46 |
| E.Capaian Realisasi Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut..... | 47 |
| BAB IV..... | 52 |
| A.Kesimpulan..... | 53 |
| B.Rencana Tindak Lanjut..... | 53 |

DAFTAR GRAFIK

Grafik .1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan.....Halaman 17

DAFTAR TABEL

| | |
|---|------------|
| Tabel.1 Pembagian Wilayah Kerja..... | Halaman 15 |
| Tabel.2 Rencana Strategis..... | Halaman 26 |
| Tabel.3 Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Ang.I dan II TA 2020..... | Halaman 27 |
| Tabel.4 Pelatihan PPTD Ang.I..... | Halaman 29 |
| Tabel.5 Pelatihan YANKOMAS Ang.I, II dan III..... | Halaman 31 |
| Tabel.6 Pelatihan E-learning..... | Halaman 33 |
| Tabel.7.Community of Practice (COP)..... | Halaman 35 |
| Tabel.8 Workshop Penguatan Zona Integritas..... | Halaman 41 |
| Tabel.9 Indikator IKU..... | Halaman 43 |
| Tabel.10 Penyerapan Anggaran..... | Halaman 44 |
| Tabel.11 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya..... | Halaman 46 |

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi/instansi adalah lah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dimaksudkan sebagai wujud kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di masa mendatang.



B.Visi, Misi, dan Tujuan

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam konteks organisasi BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Visi dan Misi yang dituangkan dalam rencana strategis ini akan identik dan mengikuti Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Sejalan dengan penetapan visi Kementerian tersebut, BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan menjalankan peran serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian visi Kementerian tersebut, khususnya dalam berbagai aspek penyiapan dan pengembangan SDM aparatur.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:



1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis / RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis / CBA*) guna mengurangi 12 umpeng tindh regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama).
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.



d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi

e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.



Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3.Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.



b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.

c. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*).

e. Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.



Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.



Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- f. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- g. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).



h. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.



Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7.Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- i. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- j. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- k. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.



Tujuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Amanah Menteri Hukum dan HAM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI telah dengan tegas menyatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Indonesia Timur;
- b. Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Indonesia Timur;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Wilayah Indonesia Timur;
- d. Pelaksanaan administrasi Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi tersebut, serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka sangat terlihat jelas indikasi bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pelatihan guna menyiapkan sumber daya manusia aparatur Wilayah Timur di bidang Hukum dan HAM sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.



Salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah *Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM* (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara menetapkan tujuan strategisnya sebagai berikut:

‘Menghasilkan SDM Hukum dan HAM wilayah Timur yang berkualitas melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Corporate University’

C. Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas:**

Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| 1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau | Batam, Kepulauan Riau | Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung |
| 2 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara | Bitung, Sulawesi Utara | Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat |
| 3 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah | Semarang, Jawa Tengah | Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur |

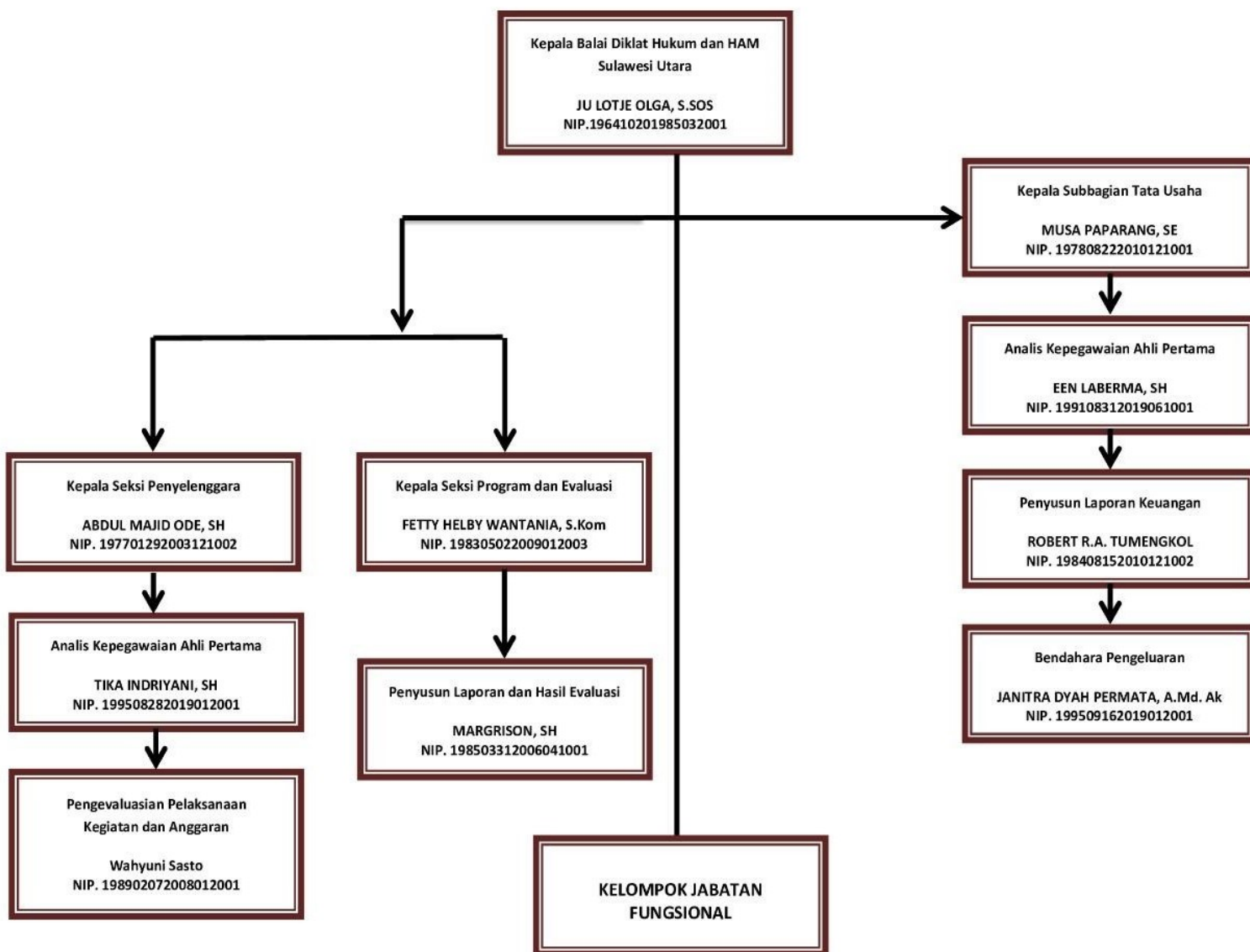
Tabel 1 .Pembagian Wilayah kerja



D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara

**Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara**

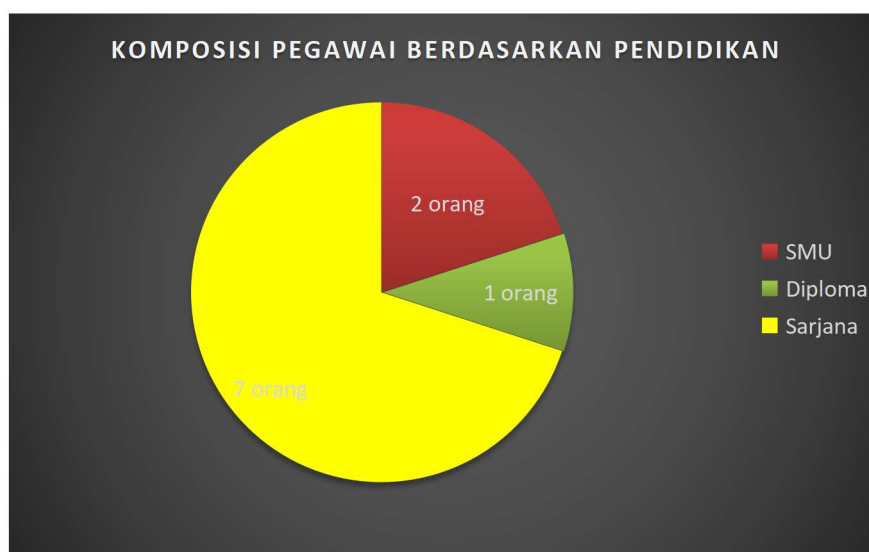


Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. 2 (dua) orang Kepala Seksi :
 - Kepala Seksi Penyelenggaraan
 - Kepala Seksi Program dan Evaluasi

| Jabatan | Jumlah |
|---------------|-----------------|
| Eselon III | 1 orang |
| Eselon IV | 3 orang |
| JFU | 5 orang |
| JFT | 2 orang |
| Jumlah | 10 orang |

Sebagaimana struktur organisasi di atas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 10 SDM



Grafik 1. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

E. Sumber Daya Manusia

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah

3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

F. Sasaran Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

Sasaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Seperti contoh, mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada peserta diklat.

Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

G. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

Bab II – Perencanaan Kinerja,

menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja, serta informasi mengenai anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020;

Bab IV – Penutup,

menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

BAB II



A. Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

Berikut informasi sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Program, dan Pagu yang harus dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 2. Rencana Strategis

| Sasaran Strategis | IKU | Target | Program | Pagu 2020 (Rp) |
|---|--|-----------|---|----------------|
| Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah | 300 orang | Diklat teknis (klasikal dan e-learning) | 2.702.167.000 |
| | Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker | 1 layanan | | 428.843.000 |
| | Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana | 1 layanan | | 8.600.000.000 |
| | Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran | 1 layanan | - | 1.393.881.000 |



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja atas apa yang menjadi sasaran strategis demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan. Adapun perjanjian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 adalah :

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|--------|
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kantor Wilayah | Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah | 80% |

Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja:

Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2019 dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan DIPA Nomor : SP.DIPA-013.12.2.409159/2020 tanggal 12 November 2019; adalah sebesar Rp 13.124.891.000 dengan rincian sebagai berikut.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

| | Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | Pagu 2020 (Rp) |
|----------|--|-----------------------|
| 5249 | <i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i> | 13.124.891.000 |
| 5249.001 | <i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i> | 2.702.167.000 |
| 5249.100 | <i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i> | 428.843.000 |
| 5249.951 | <i>Layanan sarana dan prasarana</i> | |
| 5249.994 | <i>Layanan Perkantoran</i> | 1.393.881.000 |
| | Jumlah | 13.124.891.000 |

BAB III

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat yaitu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum dan HAM, adapun output kegiatan Balai Diklat Hukum dan HAM dapat dilihat dibawah ini:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi utara terdiri dari Pelatihan klasikal, Pelatihan E-learning dan Pelatihan jarak jauh (PJJ). Dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut tentunya Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara bersinergi dengan dengan pihak-pihak terkait seperti, BPSDM Hukum dan HAM terkait rencana pelaksanaan dan permintaan tenaga Penceramah dan Widya Iswara, Kantor Wilayah terkait permintaan nama-nama calon peserta dan kesediaan tenaga pengajar, Lembaga pelatihan atau hotel sebagai tempat penyelenggaraan dan penyedia fasilitas, Serta pihak lain yang memiliki keterkaitan guna mendukung dan memberi materi pembelajaran bagi peserta. Apabila persiapan tersebut telah dilakukan maka Balai Diklat akan melakukan pemanggilan calon peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut:

Berikut ini adalah capaian kinerja kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah menyelenggarakan 3 (tiga) diklat klasikal dan 3 (tiga) diklat e-learning serta 4 (empat) pelatihan jarak jauh (PJJ) dan Community of Practice 14 Episode dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pelatihan | Tempat Penyelenggaraan | Peserta | Lulus | L/P | Keterangan |
|----|--|---------------------------|---------|-------|---|---|
| 1 | Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I | Hotel Gran Central Manado | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |
| 2 | Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan II | Hotel Gran Central Manado | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |



| | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|--|---|
| 3 | Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I | Wisma Haji Manado | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |
| 4 | Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan II | Satker Masing-masing peserta(Metode E-learning) | 40 | 30 | Laki-laki berjumlah (37 orang) Perempuan berjumlah (3 orang) Total 40 orang | Tidak lulus: (10 orang)kerena tidak mengikuti pelatihan sampai akhir |
| 5 | Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan Angkatan I dan II | | 40 | 34 | Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang | Tidak lulus: (6 orang)kerena tidak mengikuti pelatihan sampai akhir |
| | | | 40 | 34 | Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang | Tidak lulus: (6 orang)kerena tidak mengikuti pelatihan sampai akhir |
| 7 | Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I | Satker Masing-masing peserta(Metode PJJ) | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (29 orang) Perempuan berjumlah (11 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |
| 8. | Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan II | | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (28 orang) Perempuan berjumlah (10 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |
| 9. | Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan III | | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (29 orang) Perempuan berjumlah (11 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |
| 10. | Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Angkatan XXI | | 40 | 40 | Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang | Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan |

Tabel 2. Rincian kegiatan Pelatihan



1.1. Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Angkatan (KLASIKAL) I- III TA 2020

Pelatihan ini dimaksud untuk pengembangan sumber daya bagi pegawai Imigrasi di bagian pengawasan dan penindakan untuk mampu mendukung terhadap kebijakan pemerintah juga dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul dari perlintasan orang antar, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Hasil kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2020:

Tabel 3. Kegiatan Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2020

| No. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | TARGET | LULUS | TIDAK LULUS | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II Tahun Anggaran 2020 | Angkatan I 09 s/d 15 Februari 2020 | 40 orang Peserta | 40 orang Peserta | - | STTPL Telah dikirim ke peserta |
| | | Angkatan II 23 s/d 29 Februari 2020 | 40 orang Peserta | 40 orang Peserta | - | STTPL Telah dikirim ke peserta |



Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Ang. I Thn.2020





1.2. Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar pada Lapas dan Rutan Angkatan I TA 2020 (KLASIKAL)

Pelatihan ini juga merupakan program di bidang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Petugas Pemasyarakatan dalam pengamanan Lapas dan Rutan dan kegiatan Pelatihan ini berbentuk Klasikal karena pelaksanaannya sebelum terjadi Pandemi COVID 19

Hasil kegiatan Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II TA 2020 :

Tabel 4. Kegiatan PPTD Angkatan I TA 2020

| No. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | TARGET | LULUS | TIDAK LULUS | KETERANGAN |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I-II Tahun Anggaran 2020 | Angkatan I 11 s/d 21 Maret 2020 | 40 orang Peserta | 40 orang Peserta | - | STTPL Telah dikirim ke peserta |

Dokumentasi Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Ang.I Thn 2020



1.3 Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Angkatan I ,II dan III TA 2020

Pelatihan ini merupakan program pelatihan yang ditujukan bagi Pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang memberikan pemahaman secara teknis tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehingga peserta mampu memberikan masukan kepada masyarakat yang merasa hak asasinya terlanggar setelah menganalisa dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum dengan baik.

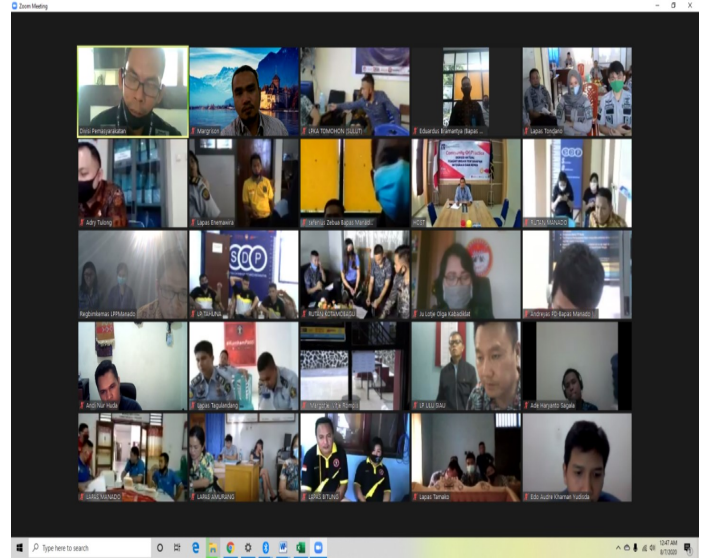
Hasil kegiatan Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2020 :

Tabel 5. Kegiatan Pelatihan YANKOMAS Ang.I ,II dan III

| No. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | TARGET | LULUS | TIDAK LULUS | KETERANGAN |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I | Angkatan I 27 s/d 30 Juli 2020 | 40 orang Peserta | 40 orang Peserta | – | STTPL Telah dikirim ke peserta |
| | | Angkatan II 11 s/d 14 Agustus 2020 | 40 orang Peserta | 40 orang Peserta | – | STTPL Telah dikirim ke peserta |
| | | Angkatan III 28 September s/d 1 Oktober 2020 | 40 orang Peserta | 40 orang Peserta | – | STTPL Telah dikirim ke peserta |



Dokumentasi Pelatihan YANKOMAS Ang.I,II dan III Metode Pelatihan Jarak Jauh(PJJ)





1.4 Pelatihan E-Learning

Pelatihan E-Learning pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana sebanyak 3(tiga) kegiatan. Pelatihan E-Learning adalah Pelatihan yang dilaksanakan secara online.

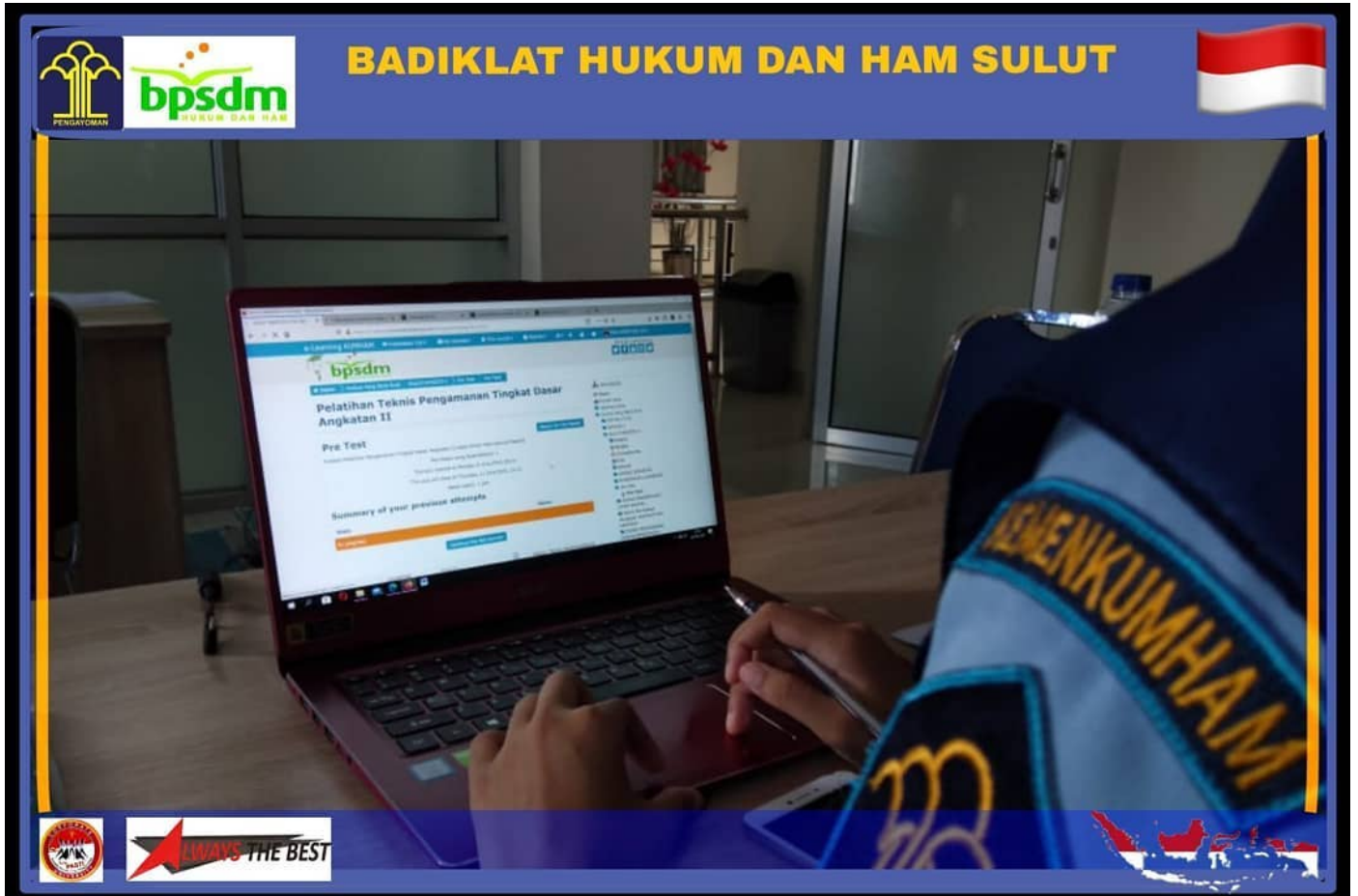
Kegiatan Pelatihan E-Learning tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah:

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan E-learning

| No. | Nama kegiatan/ Diklat | Jumlah Kegiatan | Jumlah Peserta | Lama Pelatihan | Jam Pelajaran | Rencana Penyelenggaraan Pelatihan | Keterangan Tempat Pelaksanaan |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan II | 1 Kegiatan | 40 orang | 12 Hari | 15 JP | 4 – 19 juni 2020 | Balai Diklat |
| 2. | Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjut Angkatan I dan II | 2 Kegiatan | 80 orang | 12 Hari | 55 JP | 17 Juni -02 Juni 2020 | Balai Diklat |



Dokumentasi Pelatihan Elearning





1.5 Community of Practice

Community of Practice adalah merupakan wujud dari Corporate University yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah strategi manajemen organisasi yang didesain untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya melalui pelaksanaan aktifitas yang menempa pembelajaran dan pengetahuan individual maupun institusional. Peserta CoP adalah masyarakat praktisi berdasarkan ahlinya, seseorang yang nantinya akan menjadi anggota paling tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan praktek dibidangnya, Badiklat Sulut berkomitmen untuk menerapkan strategi ini dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai yang sejalan dengan tujuan strategis instansi

Tabel.7 kegiatan COP

| No. | Nama Kegiatan | Di Mulai | Berakhir | Peserta | Lulus |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 1. | Community Of Practice Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University | 22 Juni 2020 | 22 Juni 2020 | 38 | 38 |
| 2. | Community Of Practice Penegakan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara | 17 Juli 2020 | 17 Juli 2020 | 146 | 146 |
| 3 | Community Of Practice Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Harmonis | 24 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | 67 | 67 |
| 4 | Community Of Practice Penghitungan Pentahapan Integrasi dan Remisi | 07 Agustus 2020 | 07 Agustus 2020 | 78 | 78 |
| 5 | Community Of Practice Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Konteks Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 26 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | 132 | 132 |



| | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-----|-------------|
| 6 | Community Of Practice Coaching and Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 08-Sep-20 | 08-Sep-20 | 70 | 70 |
| 7 | Community Of Practice Pencegahan Terhadap WNI yang diduga menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural | 17-Sep-20 | 17-Sep-20 | 140 | 140 |
| 8 | Community Of Practice Penegakan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua | 8 Oktober 2020 | 8 Oktober 2020 | 62 | 62 |
| 9 | Community Of Practice Peran Analisis Hukum dalam Reformasi Regulasi di Indonesia | 27 Oktober 2020 | 27 Oktober 2020 | 63 | 63 |
| 10 | Pelatihan Yankomas dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara | 16-Nov-20 | 16-Nov-20 | 50 | 50 |
| 11 | Pelatihan Yankomas dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara | 17-Nov-20 | 17-Nov-20 | 50 | 50 |
| 12 | Coaching and Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 14 Desember 2020 | 14 Desember 2020 | 135 | 135 |
| 13 | Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pasal 1 Angka 7, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 15 Desember 2020 | 15 Desember 2020 | 99 | 99 |
| 14 | Manajemen Stres Pada Era New Normal Perspektif Psikologi Pekerjaan | 17 Desember 2020 | 17 Desember 2020 | 60 | 60 |
| JUMLAH | | | | | 1190 |



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Community of Practice





1.6. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan dan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program Pendidikan dan Pelatihan mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil (*output*). Evaluasi dalam pelatihan ini dilaksanakan dengan mengadakan Pre Test dan Post Test menggunakan aplikasi CBT (*Computer Based Test*)

I. Analisa dan Laporan Evaluasi

Selama berlangsungnya Pelatihan Klasikal dan E-Learning di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2020, penyelenggara kegiatan pelatihan telah melakukan pengamatan dan penilaian secara terus menerus terhadap aktivitas peserta didalam kelas maupun di luar kelas yang meliputi beberapa aspek.

II. Aspek Learning (pembelajaran)

Aspek ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah menerima materi dari para pengajar/narasumber setiap sesi materi pelatihan.

Evaluasi tersebut juga untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau tes awal (*pree-test*) dan sesudah pelatihan atau (*post-test*) dari setiap peserta. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua isi materi dari pelatihan. Materi pelatihan yang telah diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau (*pree-test*) dan sesudah pelatihan atau test akhir (*post-test*) dari peserta. Pertanyaan-pertanyaan disuingga mencakup semua isi materi dari pelatihan.



Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang salah satunya adalah pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi yang biasa kita sebut e-gov maka Balai Diklat Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan pre-test dan post-test melalui sistim CBT (Computer Based Test), Evaluasi Penyelenggara melalui Goggle Form

III. Hasil Evaluasi

a. Hasil Evaluasi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi peserta terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Adapun tanggapan peserta secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan seperti pelaksanaan tepat waktu baik pembukaan/penutupan maupun pelaksanaan penyampaian materi, ada kelengkapan fasilitas yang cukup memadai dan bahan ajar/materi yang disampaikan cukup lengkap dan sesuai dengan kurikulum.

IV. Hasil Evaluasi Peserta terhadap Tenaga Pengajar/Penceramah

Tenaga pengajar/penceramah yang menyampaikan materi mampu dalam penguasaan materi maupun penggunaan metode ajar, sehingga membuat suasana kelas terasa lebih hidup dan para peserta tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran, hal ini dilihat dari interaksi antara para tenaga pengajar/penceramah dan para peserta yang aktif dalam melakukan diskusi dan tanya jawab.



V. Hasil Evaluasi Peserta terhadap Sarana dan Prasarana serta Makanan

a) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Hotel Gran Central Manado, cukup lengkap dan memadai. Fasilitas mulai dari kamar hotel yang bersih, ruang pertemuan yang cukup luas, kondisi lingkungan yang nyaman, serta fasilitas wifi yang cukup memadai.

b) Makanan

Makanan yang disajikan menu bervariasi dan lengkap, kebersihan dan rasa yang terjaga sehingga selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat komplain dari para peserta, tenaga pengajar/penceramah maupun tamu undangan.

2. Layanan internal dukungan manajemen satker

Pada indikator kinerja output ini terdapat beberapa *sub output* antara lain :

1. Penyusunan rancangan program dan penyusunan rencana anggaran
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
3. Pengelolaan keuangan
4. Pengelolaan kepegawaian
5. Pelayanan umum dan perlengkapan
6. Administrasi pengadaan barang dan jasa

Dari beberapa *sub output* tersebut telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu *Workshop Penguatan Zona Integritas dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja*.



Workshop Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang diikuti oleh seluruh UPT di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan peserta Kepala Unit Pelaksana Teknis dan anggota Pokja. Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah koordinator Tim Penilai Internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk memberikan penguatan kepada satuan kerja yang diusulkan untuk mengikuti evaluasi pembangunan menuju zona integritas WBK dan WBBM

Tabel.8 Kegiatan workshop Penguatan Zona Integritas

| Nama Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Keterangan | Kendala |
|---|-------------------------|--------------------|--|---------|
| Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | 10 s/d 11 November 2020 | Balai Diklat Sulut | Dengan dilaksanakan workshop ini seluruh satuan kerja yang diusulkan dapat lulus pada evaluasi pembangunan zona integritas WBK/WBBM tingkat Kementerian PAN-RB | - |



Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan Biro kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang diikuti seluruh pemangku kepegawaian yang ada di seluruh UPT di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara .Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mempraktekkan aplikasi sistem informasi Analisa jabatan dan analisa beban kerja dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pengemban kepegawaian.

3.Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator kinerja output ini adalah terselenggaranya layanan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pengadaan sarana prasarana yaitu:

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
- Renovasi gedung kantor



B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan data Indikator Kinerja utama perolehan yang ada sebagai berikut:

| IKU | Target | Realisasi | Presentase Pencapaian (%) |
|--|-----------|-----------|---------------------------|
| Jumlah lulus yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah | 300 orang | 1550 | 516 |
| | | | |
| Tersedianya layanan Internal dukungan manajemen satker | 1 layanan | layanan | 100 |
| Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana | 1 layanan | layanan | 100 |
| Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran | 1 layanan | layanan | 100 |

Tabel .9 Indikator Kinerja utama

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja utama terjadi peningkatan sebesar 516% atau jumlah kelulusan meningkat sebanyak 1250 orang



Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

| | Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | Pagu 2020 (Rp) | Penyerapan 2020 (Rp) | Capaian Penyerapan % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5249 | <i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i> | 4.653.000.000 | | |
| 5249.001 | <i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i> | 1.247.878.000 | 1.209.629.715 | 96,93% |
| 5249.100 | <i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i> | 352.193.000 | 348.116.908 | 98,84% |
| 5249.994 | <i>Layanan Perkantoran</i> | 1.700.538.000 | 1.679.650.242 | 98,77% |
| | Jumlah | 3.300.609.000 | 3.237.396.865 | 98,04% |

Tabel.10 Penyerapan Anggaran

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4.653.000.000. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 telah menyerap anggaran senilai total Rp 3.237.396.865 atau sebesar 98,04% dari total anggaran.



C.Kendala / Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Tidak tercapainya target jumlah kelulusan peserta yang mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar Angkatan II metode E-Learning TA 2020 (yang ditargetkan 40 namun yang tercapai hanya 34 (peserta), Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Lanjutan Angkatan I dan II metode E-learning TA 2020 (ditargetkan 80 peserta namun yang tercapai hanya 64)

- - Dengan adanya perubahan mode pelatihan dan refocusing anggaran sehingga berpengaruh pada penilaian terhadap Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA) khususnya pada rencana penarikan dana pada Balai Diklat Hukum dan HAM.



D. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Badiklat Sulawesi Utara

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara TA 2019 dengan TA 2020 :

| Sasaran Strategis | IKU | 2019 | | | 2020 | | |
|---|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah | 1054 | 1054 | 100 | 300 | 1550 | 516 |
| | Tersedianya layanan dukungan manajemen satker | 1 layanan | 1 layanan | 100 | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| | Terselenggaranya Layanan sarana prasarana | 1 layanan | 1 layanan | 100 | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| | Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran | 1 layanan | 1 layanan | 100 | 1 layanan | 1 layanan | 100 |

Tabel.11 Data perbandingan capaian kinerja

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada TA 2020 telah terjadi peningkatan capaian kinerja pada indikator jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah yang menunjukkan bahwa kinerja Balai Diklat dalam menyelenggarakan kegiatan diklat meningkat dibandingkan TA 2019. Hal ini terlihat dari capaian realisasi meningkat sebesar 416% dan jumlah lulusan diklat yang jauh lebih banyak dari tahun 2019 yaitu sebanyak 1.550 orang. Kenaikan capaian output di tahun 2020 secara signifikan ini karena adanya penambahan kegiatan Community of Practice dan Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian



E. Capaian Realisasi Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

| | | 2020 | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 5249.001 | Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM | 11.232.897.000 | 9.065.310.117 | 80,70 |
| 5249.100 | Dukungan Manajemen Satker | 236.640.000 | 1.638.967.513 | 97,26 |
| 5249.994 | Layanan Perkantoran | 1.725.093.000 | 1.638.967.513 | 95 |
| | | 13.194.630.000 | 10.934.443.895 | 82,87 |



Penyerapan anggaran pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk pelatihan Hukum dan HAM

| | Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | Pagu 2020 (Rp) | Penyerapan 2020 (Rp) | Presentase Penyerapan Anggaran (%) |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| 5249 | <i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i> | 4.653.000.000 | | |
| 5249.001 | <i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i> | 1.247.878.000 | 1.209.629.715 | 96,93 |
| 5249.100 | <i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i> | 352.193.000 | 348.116.908 | 98,84 |
| 5249.951 | <i>Layanan sarana dan prasarana</i> | 1.352.391.000 | 1.307.609.763 | 96,68 |
| 5249.994 | <i>Operasional dan pemeliharaan kantor</i> | 1.062.924.000 | 1.051.823.980 | 98,95 |
| | Jumlah | 4.653.000.000 | 4.545.006.628 | 97,68 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4.653.000.000 Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 telah menyerap anggaran senilai total Rp 4.545.006.628 atau sebesar 97,68% dari total anggaran



| No. | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Anggaran | Realisasi | Sisa | Estimasi Persentase Realisasi (%) |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. | Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar | Angkatan I : 11 s.d 21 Maret 2020 (klasikal) | Rp.328.595.000 | Rp.322.595.000 | Rp. 6.000.900 | 98,17% |
| 2. | Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian | Angkatan I : 09 s.d 15 Februari 2020 Angkatan II : 23 s.d 29 Feburari 2020 | Rp.724.338.000 | Rp.707.623.365 | Rp. 16.714.635 | 97,69% |



| | | | | | | |
|----|---|--|----------------|----------------|---------------|---------|
| 3. | Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan II Metode <i>e-learning</i> | 11 s.d 21 Maret 2020 05 s.d 19 Juni 2020 | Rp.6.250.000 | Rp.6.250.000 | Rp. 6.000.000 | 96 % |
| 4. | Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan | Angkatan I: Ang. I : 09 Mar s/d 23 Mar 2021 Ang. II : 06 Apr s/d 17 Apr 2021 Angkatan II: 25–30Agustus | Rp. 12.500.000 | Rp. 12.000.000 | Rp.13.032.500 | 96 % |
| 5. | Community Of Practice | | Rp. 64.400.000 | Rp. 56.136.350 | Rp 8.263.650 | 87,16 % |
| | Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Harmonis | 24 Juli 2020 | | | | |
| | Penghitungan Pentahapan Integrasi dan Remisi | 07 Agustus 2020 | | | | |
| | Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Konteks Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 26 Agustus 2020 | | | | |
| | Coaching and Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 17 Sept 2020 | | | | |
| | Pencegahan Terhadap WNI yang diduga menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural | 27 Oktober 2020 | | | | |
| | Penegakan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua | 17 Juli 2020 | | | | |
| | Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Harmonis | 24 Juli 2020 | | | | |



| | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | Penghitungan Pentahapan Integrasi dan Remisi | 07 Agustus 2020 | | | | |
| | Coaching and Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 08 Sept 2020 | | | | |
| | Pencegahan Terhadap WNI yang diduga menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural | 17 Sept 2020 | | | | |
| | Penegakan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kantor | 8 Oktober 2020 | | | | |
| | Peran Analisis Hukum Dalam Reformasi Regulasi di Indonesia | 27 Oktober 2020 | | | | |
| | Pelatihan Yankomas dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara | 16 Nov 2020 | | | | |
| | Pelatihan Yankomas dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku | 17 Nov 2020 | | | | |
| | Perolehan Angka Kredit dari Unsur Pengembangan Profesi Bagi Jabatan Fungsional Analis | 14 Des 2020 | | | | |
| | Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang | 15 Des 2020 | | | | |
| | Manajemen Stres pada Era New Normal Perspektif Psikologi Pekerjaan | 17 Des 2020 | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | Rp. 4.653.000.000 | Rp.4.545.006.500 | Rp.107.993.372 | 97,68% |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian output kegiatan pendidikan dan pelatihan dari target 300 orang menjadi 1550 orang atau sebesar 516 % dan peningkatan pencapaian kinerja keuangan yang dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 97,68% dari penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 82,87%. Artinya pada tahun 2020 ada peningkatan sebesar 14,81% dengan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dari hasil pencapaian tersebut masih terdapat adanya hambatan baik dalam pencapaian target output kegiatan di beberapa pelatihan maupun dalam hal pencapaian kinerja keuangan khususnya penilaian IKPA.

B. Rencana Tindak lanjut

Sebagai penyelenggara pelatihan di wilayah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara akan terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan guna meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang ada di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara serta lebih meningkatkan kinerja dalam hal pemanfaatan anggaran yang lebih transparan, efektif dan efisien.